

**SIKAP POLITIK PARTAI MASYUMI  
PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO  
(1955-1960)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA AGAMA DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**M. RIDWAN**  
**NIM. 96372492**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. PROF. DRs. H. ZARKASJI ABDUS SALAM**
- 2. DRs. M. SODIK, S.SOS. M. Si**

**JINAYAT-SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH  
YOGYAKARTA  
1422 H/2001 M**

## ABSTRAK

Karena pemberontakan PRRI di Sumatera melibatkan anggota-anggota Masyumi, maka Masyumi mengalami perpecahanyaitu kubu Prawoto Mangkusasmito dan kubu Yusuf Wibisono yang akhirnya keluar dari keanggotaan Masyumi karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai tidak tegas. Kubu Yusuf Wibisono memandang Masyumi harus mengambil sikap yang keras terhadap para pemberontak termasuk para pemimpin Masyumi yang terlibat. Apa yang mereka lakukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Masyumi, dan tidak dapat dibiarkan. Sementara kubu Mangkusasmito berpendapat lain, kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno untuk mencampuri persoalan kabinet dan konstituante merupakan pelanggaran UUD 1945, apalagi kebijakan untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin adalah penodaan terhadap demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh Masyumi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis dan explanatoris, dengan menggunakan pendekatan normative-historis. Penelitian ini adalah tergolong penelitian sejarah, maka sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif.

Bahwa peranan Partai Masyumi pada masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960) adalah berperan dalam hal Pemerintah dan berperan dalam hal Perundang-undangan. Peranan Masyumi dalam hal pemerintah, ada dua macam peran yang dimainkan yaitu yang pertama, sebagai Partai pendukung Pemerintah dengan naiknya Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri (Agustus 1955-Maret 1956). Kedua sebagai oposisi Pemerintah dengan menggunakan dua metode yaitu Oposisi Parlemenarian dan Oposisi Ekstra Parlemenarian. Untuk peranan Masyumi dalam perundang-undangan yaitu bahwa Partai Masyumi selalu menolak setiap perundang-undangan.

**Key word: politik, Partai masyumi, Pemerintahan Soekarno**



**PROF. DRS. ZARKASJI ABDUS SALAM**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. M. Ridwan

Lamp : 4 Ekslembar Skripsi

Kepada Yang Terhormat.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**

di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : M. Ridwan  
NIM : 9637 2492  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **PARTAI MASYUMI PADA MASA  
PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960)**

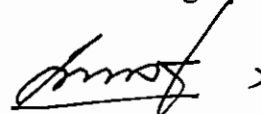
maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan agar dapat diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Zulqa'dah 1421 H.  
19 Februari 2001 M.

Pembimbing I



Prof. Drs. Zarkasji Abdus Salam  
NIP. 150 231 514

**DRS. M. SHODIK S. SOS, MSi.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. M. Ridwan

Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
**Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga**

di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : M. Ridwan

NIM : 9637 2492

Fakultas : Syari'ah

Judul : **PARTAI MASYUMI PADA MASA  
PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960)**

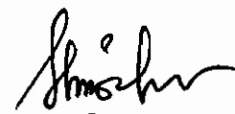
maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan agar dapat diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Zulqadiah 1421 H.  
19 Februari 2001 M.

Pembimbing II



Drs. M. Shodik, S. Sos, M. SI  
NIP. 150 231 514

**PENGESAHAN**  
Skripsi Berjudul  
**SIKAP POLITIK PARTAI MASYUMI**  
**PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960)**  
Oleh:  
**M. Ridwan**  
**NIM: 9637 2492**

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 16 Juni 2001 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Hukum Islam.

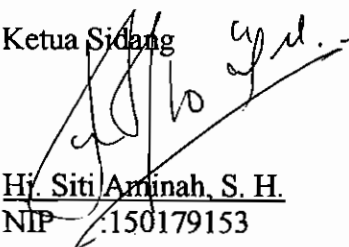
Yogyakarta, 05 Rabi'ul Tsani 1422 H  
28 Juni 2001 M

Dekan  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

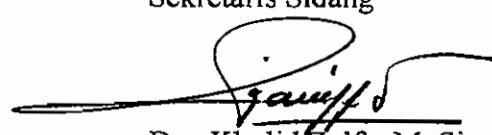


Panitia Munaqasah

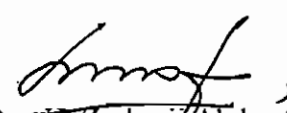
Ketua Sidang

  
Hj. Siti Aminah, S. H.  
NIP :150179153

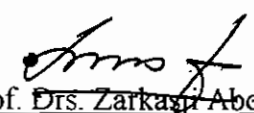
Sekretaris Sidang

  
Drs. Kholid Zulfa, M. Si  
NIP :150266740

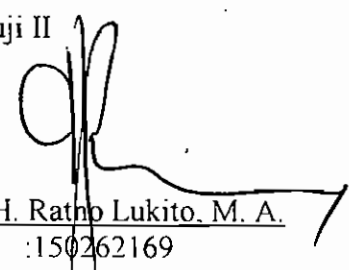
Penguji I

  
Prof. Drs. H. Zarkasi Abdus S.  
NIP :150046306

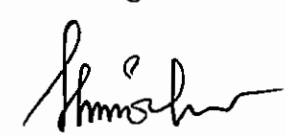
Pembimbing I

  
Prof. Drs. Zarkasi Abdus S.  
NIP :150046306

Penguji II

  
Drs. H. Ratho Lukito, M. A.  
NIP :150262169

Pembimbing II


  
Drs. M. Sodik, S. Sos. M. Si  
NIP :150275040

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal`	d	de
ذ	zal`	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)




	za	z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'-	koma terbalik (di atas)
	gain	g	ge
	fa	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wau	w	we
	ha	h	ha
hamzah	'-	apostrof	
ya	y	ye	

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	a
	kasrah	i	i
	dammah	u	u



## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كتب - kataba

سوف - saufa

فعل - fa'ala

كيف - kaifa

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjangnya yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
وِ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رامي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضۃ الأطفال - raudatul atfāl

المدینة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

#### E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - Rabbanā

نَزَّلَ - Nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

### 1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرجل - ar-rajulu  
السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu  
المجال - al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai`un  
ان - inna

أمرت - umirtu  
تأخذون - ta`khuẓūna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi`il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير - wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau  
الزائقين - wa innalāha lahuwa khairur-rāiqīn  
فأوفوا الكيل - fa aufu al-kaila wa al-mīzāna atau

والميزان fa aful-kalia wal-mīzāna

## I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistim tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wamā Muḥamadun illā Rasūl  
نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāh wa fathun qarīb

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmad dan HidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta Salam tak terlupakan kami panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari realitas kegelapan menuju ke realitas pencerahan dengan ajaran-Nya.

Penyusun sangat sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa skripsi yang berjudul "PARTAI MASYUMI PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960) ini jauh dari kesempurnaan. Walaupun begitu penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang hukum Islam. Penyusun juga berharap agar goresan pena ini dapat dijadikan sebagai "museum" intelektual dalam zaman yang terus "membatu" ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

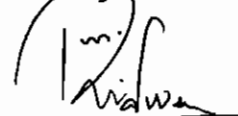
1. Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam selaku Ketua Jurusan Jinayat-Siyasah sekaligus Pembimbing I yang tidak jemu-jemunya untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penyusun.

2. Drs. M. Shodik S. Sos, M. Si selaku Pembimbing II yang dengan kesabarannya dan mencurahkan segala yang beliau punyai untuk membimbing penyusun dimanapun beliau berada.
3. Kedua orang tua penyusun yang selalu memberikan *support* baik materiil maupun spirituil sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus menyelesaikan tugas studi S 1 penyusun.
4. Kedua adik tercinta yang ada di “penjara suci Andalusia” yang selalu setia pada orang tua yang terkadang membuat penyusun terhibur dengan aksi-aksinya dan kepada tersayang yang selalu memberikan dorongan kepada penyusun ketika malas dan memberikan bantuan baik berupa saran maupun kritikan.

Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esalah segala kebaikan dan juga “kejelekan” kita kembalikan. Semoga dengan kata pengantar ini, skripsi ini bisa bermanfaat. (amien)

Yogyakarta, 02 Zulqa'dah 1421 H  
28 Januari 2001 M

Penyusun



M. Ridwan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	PENDAHULUAN.....1
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Pokok Masalah.....6
	C. Tujuan dan Kegunaan..... 6
	D. Telaah Pustaka.....6
	E. Kerangka Teoritik.....8
	F. Metode Penelitian..... 13
	G. Sistematika Pembahasan.....15
BAB II	TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAN PARTAI POLITIK.....17
	A. Pengertian Pemerintahan.....17
	B. Partai Politik dan Pemerintahan.....25
	1. Definisi Partai Politik.....26



	2. Urgensitas Partai Politik dalam Pemerintahan.....	32
BAB III	PARTAI MASYUMI DAN PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960).....	34
	A. Pemerintahan Soekarno (1955-1960).....	34
	B. Sikap Partai Masyumi terhadap Pemerintah Soekarno (1955-1960).....	46
	1. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955- Maret 1956).....	46
	2. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957).....	53
	3. Kabinet Djuanda Kartawijaya (Maret 1957-Juli 1959).....	58
	3. Sikap Partai Masyumi terhadap Perundang-undangan masa Soekarno (1955-1960).....	70
BAB IV	ANALISIS SIKAP POLITIK PARTAI MASYUMI PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960)...	89
	1. Sikap Partai Masyumi terhadap Pemerintah Soekarno (1955-1960).....	89
	2. Sikap Partai Masyumi terhadap Perundang-undangan masa Soekarno (1955-1960).....	96
BAB V	PENUTUP.....	101

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	I
1. Biografi Ulama dan Sarjana.....	I
2. Curriculum Vitae.....	V

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan demokratis merupakan dambaan semua penduduk suatu negara. Jaminan untuk menyampaikan aspirasi, kebebasan berpendapat dan persamaan dalam hukum merupakan cita-cita dari semua bangsa. Begitu juga Indonesia, salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Mereka menginginkan pimpinan negara adalah seorang muslim yang taat, demokratis dan mengayomi semua rakyatnya. Indonesia sekarang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid yang jelas-jelas merupakan cucu dari K.H. Hasyim Asy'ary. Dalam kepemimpinannya, Gus Dur lebih mengedepankan aspek akomodasi antar berbagai aliran politik. Umat Islam pun berharap agar tidak hanya bisa mengakomodir dan mempersatukan seluruh elemen bangsa akan tetapi juga diharapkan bisa memperjuangkan aspirasi umat Islam yang selama ini selalu dipinggirkan. Cita-cita untuk membentuk negara Islam sudah dibangun sejak Indonesia merdeka atau tepatnya ketika terjadi pertentangan antara kubu Islam dan Nasionalis dalam sidang Konstituante.

Kepemimpinan Gus Dur banyak didukung oleh mayoritas partai yang menang dalam Pemilihan Umum 1999. Bahkan dalam pemilihan presiden poros tengahnya yang berjasa menjadikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Akan tetapi setelah melihat kepemimpinannya poros tengah berbalik menjadi oposisi yang selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bahkan terkadang melampaui batas wewenang oposisi.

Persoalan dukung-mendukung dan anti terhadap sebuah kepemimpinan tidak hanya terjadi dimasa sekarang akan tetapi dahulu pada zaman Soekarno

juga demikian. Pada zaman Soekarno ada dua kubu besar yaitu Nasionalis dan Islamis. Golongan Nasionalis yang dimotori oleh PNI selalu mendukung Soekarno, berbeda dengan kelompok Islam. Kelompok yang dipimpin oleh K. H. Masjkur<sup>1)</sup> ini menginginkan Indonesia berdasarkan Islam. Pendapat kelompok Islam sangat dipengaruhi oleh Partai Masyumi yang waktu itu identik dengan Moh. Natsir.<sup>2)</sup> Dalam Konstituante Moh. Natsir menolak Pancasila yang sebelumnya dia unggulkan dengan beberapa sebab sebagaimana yang diungkapkan oleh Deliar Noer dalam bukunya *Islam, Pancasila dan Azas Tunggal*:

Pertama, Konstituante merupakan forum pembahasan terbuka, forum pembeding pendapat. Sebagaimana anggota lain mengemukakan pemikiran mereka tentang dasar negara secara terbuka dan tuntas, ia (Natsir) juga bersikap demikian. Kedua, ia dan kawan-kawannya dari organisasi Islam ingin mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh para pemilih yang telah mempercayakan kepada mereka aspirasi ummat untuk diperjuangkan. Ketiga, seperti juga para anggota lain dari Konstituante, ia dan kawan-kawannya ingin memperkenalkan keagungan keyakinan masing-masing.<sup>3)</sup>

K. H. Masjkur sebelumnya telah dilobi oleh Soekarno untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara akan tetapi dia menolak.<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Soebagijo I. N, *K. H. Masjkur; Sebuah Biografi*, cetakan ke-1, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), hlm. 183.

<sup>2)</sup> Sebenarnya tidak hanya Moh. Natsir dari Partai Masyumi saja kan tetapi Partai NU juga menginginkan dasar negara adalah Islam. Soebagijo I. N, *K. H. Masjkur; Sebuah Biografi*, cetakan ke-1, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), hlm. 182. Dan tidak hanya kedua partai tersebut akan tetapi seluruh partai Islam ingin agar Islam dijadikan dasar negara. Deliar Noer, *Partai Islam di Pintas Nasional 1945-1965*, cetakan ke-1, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm. 117.

<sup>3)</sup> Deliar Noer, *Islam, Pancasila dan Azas Tunggal*, cetakan ke-2, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), hlm. 111.

<sup>4)</sup> Untuk persoalan ini baca Soebagijo I. N, *K. H. Masjkur; Sebuah Biografi*, cetakan ke-1, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), hlm. 183.

Soekarno sangat berkepentingan sekali dengan Pancasila sebagai dasar negara karena menurutnya Pancasila merupakan satu kompromi yang dapat mempersatukan berbagai macam golongan<sup>5)</sup> dan dialah yang menciptakan dan menemukan kata-kata itu<sup>6)</sup>.

Pertentangan yang ideologis dalam Konstituante ini berimbas pada roda pemerintahan dan juga pada kondisi masyarakat. Kabinet Ali II jatuh disebabkan karena tidak kuatnya konsolidasi politisi sipil dalam pemerintahan sehingga militer melakukan manuver dengan membentuk dewan-dewan daerah pada 1956 dan mencapai puncaknya dengan pemberontakan PRRI-Permesta pada tahun 1958.<sup>7)</sup> Persoalan ini menarik partai-partai yang ada dalam parlemen, misalnya Masyumi dan NU. Akhirnya Masyumi menarik seluruh menteri-menternya dari Kabinet Ali II dengan argumentasi bahwa langkah-langkah pemerintah tidak memberi keyakinan Masyumi bahwa ia akan membawa menuju kesejahteraan rakyat dan negara.<sup>8)</sup>

---

<sup>5)</sup> Herbert Feith & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, cetakan ke-2, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 157.

<sup>6)</sup> Kaelan, M. S, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 1996), hlm. 32. Sartono Kartodirjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, edisi ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1972), hlm. 18. Noor Ms. Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, edisi ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1994), hlm. 52.

<sup>7)</sup> J. Eliseo Rocamora, *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, alih bahasa Pustaka Utama Grafiti, cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991), hlm. 179. Pemberontakan dewan daerah merupakan akibat dari gagalnya peristiwa 17 Oktober 1952, dimana sekelompok perwira berupaya melakukan kudeta dalam upaya membubarkan Parlemen Sementara yang tidak efisien. W. F. Wartheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*, alih bahasa Misbah Ellizabet, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 283

<sup>8)</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, cetakan ke-1, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm. 255.

Pasca Kabinet Ali II runtuh pada tanggal 13 Maret 1957 maka dibentuklah kabinet dibawah seorang politisi non partai, Djuanda Kartawidjaja pada tanggal 4 April 1957. Kabinet Djuanda merupakan kabinet yang bertugas untuk menyelesaikan disintegrasi pusat dan daerah, memperjuangkan Irian Barat untuk kembali kepangkuan ibu pertiwi, menstabilkan keadaan ekonomi yang terus merosot dan meningkatkan pemasukan devisa serta *export-import* Indonesia.

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI-NU walaupun sebenarnya lebih didominasi oleh orang-orang non partai dan orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing sehingga disebut juga kabinet ahli (*zaken kabinet*) seperti Chairul Shaleh. Masyumi menolak orang-orangnya ditempatkan dalam kabinet karena tidak diajak dalam tim formatur penyusunan kabinet, walaupun ada 2 orang anggota Masyumi yang duduk dalam kabinet akan tetapi dikeluarkan dari keanggotaan Masyumi.

Karena sering terjadinya pergantian kabinet yang membuat negara dalam keadaan tidak stabil maka Soekarno pada bulan Februari 1957 mengeluarkan konsepsi untuk menyelamatkan negara. Akan tetapi konsepsi ini ditentang oleh mayoritas partai khususnya partai Masyumi.

Soekarno tetap saja dengan pendiriannya sehingga pada bulan Mei 1957 dibentuklah Dewan Nasional yang terdiri atas empat puluh satu wakil "golongan fungsionil" ditambah beberapa anggota *ex officio*.<sup>9)</sup> Dewan Nasional

---

<sup>9)</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, alih bahasa Gadjah Mada University Press, cetakan ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 390.

ini dipimpin oleh Soekarno sendiri. Inilah awal dari berlakunya Demokrasi Terpimpin menurut istilah Soekarno sendiri.

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini peranan partai tidak muncul bahkan cenderung dihilangkan. Masyumi pada masa ini sebenarnya mengajukan solusi agar dibentuk kabinet presidensial dibawah Soekarno sendiri, akan tetapi Soekarno tidak menerima solusi ini.

Karena pemberontakan PRRI di Sumatera yang melibatkan anggota-anggota Masyumi, diantaranya adalah Moh. Natsir dan Syafruddin Prawiranegara, Masyumi mengalami perpecahan yaitu, kubu Prawoto Mangkusasmito dan kubu Yusuf Wibisono yang akhirnya keluar dari keanggotaan Masyumi karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai tidak tegas. Kubu Yusuf Wibisono memandang Masyumi harus mengambil sikap yang keras terhadap para pemberontak termasuk para pemimpin Masyumi yang terlibat. Apa yang mereka lakukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Masyumi, dan oleh sebab itu tidak dapat dibiarkan.<sup>10)</sup>

Sementara kubu Prawoto Mangkusasmito berpendapat lain, kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno untuk mencampuri persoalan kabinet dan konstituante merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945, apalagi kebijakan untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin adalah penodaan terhadap demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh Masyumi. Masyumi ingin mempertahankan dan mengembangkan Demokrasi, akan tetapi bukan Demokrasi Terpimpin.<sup>11)</sup>

---

<sup>10)</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, cetakan ke-1, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm. 380.

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hlm. 382.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana sikap politik Partai Masyumi pada masa pemerintahan Soekarno selama tahun 1955-1960?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara pasti sikap Masyumi pada masa pemerintahan Soekarno selama tahun 1955-1960.
2. Untuk mengetahui secara obyektif apakah benar Masyumi secara organisasional terlibat dalam pemberontakan PRRI yang merupakan *causa prima* dari dibubarkannya Masyumi?

Kegunaannya adalah :

1. Untuk mengetahui secara obyektif sikap umat Islam dalam perpolitikan Indonesia, khususnya sikap Masyumi yang merupakan salah satu partai perwakilan umat Islam dalam pentas politik nasional.
2. Menambah wawasan dalam praktek *fiqh siyasah* terutama partai-partai Islam dalam pentas perpolitikan nasional, khususnya Masyumi pada tahun 1955-1960.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang membahas secara khusus tentang Partai Masyumi pada masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960) sepengetahuan penulis belum ada. Titik fokus penelitian adalah pada kiprah atau peranan partai Masyumi dalam



pemerintahan. Pemerintahan disini dimaknai sebagai perbuatan (cara, hal, urusan dan lain-lain) memerintah<sup>12)</sup> atau dalam pengertian secara luas pemerintahan atau *government* dalam bahasa Inggrisnya adalah sekelompok orang yang memerintah suatu negara<sup>13)</sup>. Dengan pemaknaan terminologi pemerintahan seperti diatas maka penulis lebih menfokuskan pada peranan partai Masyumi semasa 1955-1960 dalam hal ideologi ataupun cara Soekarno memerintah dalam tahun tersebut.

Ada buku yang ditulis oleh Deliar Noer yang membahas tentang partai Islam di Indonesia yaitu *Partai Islam dalam Pentas Nasional 1945-1965*. Buku ini merupakan hasil studi Deliar Noer mengenai pasang surut partai-partai Islam sebatas 1945-1965, terutama menyangkut peranan dan organisasi partai-partai tersebut<sup>14)</sup> dan tidak secara khusus membahas tentang penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rujukan utama dokumentasi, arsip, catatan atau laporan tahunan dari partai itu sendiri, autobiografi tokoh yang terlibat dalam partai Masyumi dan dokumen resmi

---

<sup>12)</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan ke-5, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 740.

<sup>13)</sup> AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Edisi ke-5, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 331.

<sup>14)</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, cetakan ke-1, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm. v

pemerintah<sup>15)</sup> selain karya ilmiah yang sudah disebutkan di atas, *Partai Islam dalam Pentas Nasional* karya Deliar Noer. Untuk mendukung referensi yang utama maka penulis menggunakan semua karya ilmiah yang membahas tentang Masyumi terutama kurun waktu 1955-1960 dan juga buku-buku sejarah yang ditulis secara individual maupun tim.

#### E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah negara demokrasi,<sup>16)</sup> disyaratkan adanya (1) *open-class society*, (2) *communicative society*, (3) *mass consumption society*, (4) *pluralist society*<sup>17)</sup> dan dijaminnya kebebasan individu untuk melaksanakan hak-haknya. Sebagaimana dikatakan oleh S. I Benn dan R. S. Paters;

---

<sup>15)</sup> Karena ini merupakan kategori penelitian sejarah maka sumber primernya adalah dokumentasi organisasi yang diteliti dalam hal ini Masyumi yang berupa catatan Kongres atau rapat, buku kenang-kenangan organisasi, laporan tahunan atau majalah yang diterbitkan oleh organisasi, autobiografi tokoh yang terlibat dalam organisasi tersebut dan dokumentasi resmi pemerintah. Ldt. Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto, cetakan ke-5, (Jakarta: UI Pres, 1975), hlm. 38. dan juga Hasan Usman, *Seri Penterjemahan: Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Depag, 1986), hlm. 64-65.

<sup>16)</sup> Demokrasi muncul sejak dikeluarkannya *demokratia* pada abad kelima SM untuk menerangkan sistem demokrasi yang berlaku di negara-kota Yunani-Kuno. Istilah ini berasal dari 2 kata yaitu "pemerintahan (*kratia*) dan rakyat (*demos*)". Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, cetakan ke-1, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 4. Secara umum demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Perdebatan yang timbul dan sangat kuno adalah demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan. Pengertian demokrasi mengalami perkembangan karena negara-kota telah punah dan muncullah negara-bangsa, sementara dalam transformasi demokrasi kedua ini, gagasan demokrasi telah dipindahkan dari negara-kota menuju negara-bangsa (*nation-state*) yang skalanya jauh lebih luas. Transformasi inilah yang menyebabkan timbulnya seperangkat lembaga politik yang baru. Kumpulan lembaga baru inilah yang secara keseluruhan sekarang dinamakan Demokrasi. Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, alih bahasa tim Yayasan Obor Indonesia, jilid I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 4.

<sup>17)</sup> Kuntowijoyo, *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Benteng, 1994), hlm. 76.

...that they suggest some of egalitarianism .....a person as "democratic" meant that he was " a person of simple and friendly spirit and genial manners. 'a good mixer' and who, whatever his wealth or status, makes no assumption of superiority".<sup>15)</sup>

Dan yang lebih penting adalah *pluralist society* dalam artian bahwa harus ada persamaan (*equality*) diantara mereka dan tidak ada diskriminasi.<sup>15)</sup>

Pra-syarat menjadi negara demokratis sudah terpenuhi dalam negara Indonesia atau paling tidak bahwa demokrasi yang diasumsikan oleh Robert Dahl sudah bisa dipraktekkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini sebab Indonesia merupakan *nation-state* yang sangat luas.<sup>20)</sup>

---

<sup>15)</sup> S. I. Benn dan R. S. Paters, *The Principle of Political Thought*, (New York: Colliers Book, 1959), hlm. 394.

<sup>17)</sup> Prinsip persamaan (*Equality*) inilah yang menjadi fokus penting dalam negara demokrasi. Harvey Wheeler, *Democracy in Revolutionary Era: The Political Order Today*, (Hammersworth: Penguin Book, 1971), hlm. 68. Sementara Kai Nielsen tidak memasukkan persamaan (*equality*) itu sebagai syarat tersendiri akan tetapi secara tidak langsung jika kebebasan (*egalitarianism*) sudah menjadi pra-syarat maka secara otomatis *equality* sudah menjadi bagiannya karena persamaan dan kemerdekaan merupakan bentuk final untuk menghadapi *egalitarianism*. Kai Nielsen, *Equality and Liberty: A Defence of Radical Egalitarianism*, (New Jersey USA: Rowman & Allandheild Publishers, 1985), hlm. 281.

<sup>20)</sup> *Nation-state* merupakan transformasi kedua "demokrasi" yang menghasilkan tradisi Republikanisme, perwakilan dan logika persamaan. Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, alih bahasa Yayasan Obor Indonesia, jilid I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 24. Sebenarnya perdebatan tentang *nation-state* sudah usang apalagi pada masa sekarang dimana *nation-state* merupakan motor dari pengrusakan dan penghancuran dunia modern. Padahal munculnya *nation-state* adalah sebuah upaya untuk masuk ke dalam alam modern. Negara absolut ditumbangkan bukan hanya karena para penguasanya yang menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang, tetapi karena negara absolut itu bertentangan dengan rasionalitas. Kehancuran negara absolut kecuali ditandai oleh naiknya "orang-orang biasa" ke puncak kepemimpinan, juga diiringi dengan penggusuran kekuatan anti modern. "Kekuasaan" harus disetujui oleh rakyat yang diperintah, tidak oleh otoritas lain, termasuk Allah. *Nation-state* memang pada waktu itu benar-benar diyakini sebagai ujung tombak mengenai modernitas. Anthony Giddens, *The Third Way, The Renewal of Social Democracy*, alih bahasa Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia, 1999) hlm. 36-37 dan juga baca makalah I. Wibowo, "Negara dan Modernitas menurut Anthony Giddens", makalah disampaikan dalam simposium *Dunia yang Berlari: Teori Anthony Giddens tentang Modernitas* sebuah simposium yang diadakan oleh Majalah Basis dan Penerbit Gramedia Pustaka Utama di teater Utan Kayu, Jakarta, Sabtu 4 Desember 1999. Sementara di Asia dan Afrika gejala *nation-state* baru terjadi 'gelombang terakhir' -nasionalisme abad ke-20- dan ini merupakan jiplakan dari negara-kebangsaan yang ada di Amerika dan Eropa sebelumnya. Benedict Anderson, *Komunitas-komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme*, alih bahasa Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 1999), hlm. xvi

Dari sejak proklamasi 1945, PPKI menunjuk Soekarno dan Hatta untuk menjadi presiden dan wakilnya, bentuk negara adalah Republik yang berdasarkan kedaulatan rakyat,<sup>21)</sup> yang dalam pelaksanaannya dibentuklah kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri.<sup>22)</sup> Untuk mendukung kinerja pemerintahan dan meramaikannya kehidupan demokrasi di Indonesia yang telah cukup lama dibentuk dan dilaksanakan sebelum Indonesia merdeka dan sambil menunggu pemilihan umum yang pertama maka pada tanggal 30 Maret 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia memutuskan untuk membentuk partai atas dasar konsep banyak partai (*multi party*),<sup>23)</sup> maka tumbuhlah berbagai macam partai sebagai manifestasi dari berbagai macam ideologi dan keyakinan yang ada dalam masyarakat.

Dalam suasana demokratis, kebebasan, perbedaan pendapat sangat dihormati demi kemajuan dan tujuan yang dituntut oleh warga negara. Konsep saling mengawasi dan berkompetisi dijunjung tinggi, Sartori mengatakan:

---

<sup>21)</sup> Menurut Hatta kedaulatan rakyat yang digurakan dan dipropagandakan oleh kalangan pergerakan nasional berbeda dengan konsepsi Rosseau, yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat yang diasumsikan adalah kedaulatan rakyat yang berakar dari pergaulan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi ciri khas dari demokrasi Indonesia. Muhammad Hatta, "Masyarakat Kolonial dan Cita-Cita Demokrasi Sosial" dalam Herbert Feith & Lance Castle (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, cetakan ke-1, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 11

<sup>22)</sup> Sistem Pemerintahan seperti ini disebut pemerintahan parlementer dimana kepala negara berhak mengangkat kepala pemerintahan (perdana Menteri) dan perdana menteri mengangkat menteri yang menjadi pembantunya. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab tidak kepada kepala negara secara politik akan tetapi kepada majelis. Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Ibrahim dkk (penyadur), cetakan ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 36-43.

<sup>23)</sup> Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, cetakan ke-4, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 26

"Demokrasi adalah suatu sistem politik dimana pengaruh kelompok mayoritas dijamin oleh kelompok minoritas yang dipilih dan berkompetisi dan kepadanya sistem ini dipercayakan."<sup>24)</sup>

Dalam sebuah demokrasi harus ada *check and balance*, konsep inilah yang dalam kosakata politik modern disebut oposisi yang tugasnya adalah mengontrol pemerintah<sup>25)</sup> yang dipegang oleh partai yang menang dalam pemilihan umum dan merupakan representasi dari suara mayoritas rakyat.

Fungsi kontrol parlemen ditugaskan pada partai-partai yang kalah dalam pemilihan umum dan pemerintahan dipegang oleh partai yang menang. Oposisi dalam hal ini digunakan untuk menyatukan bangsa dan memberikan saran ataupun kritikan kepada penguasa atau parlemen jika tidak sesuai dengan tujuan berbangsa dan keinginan mayoritas rakyat.

Dalam wacana perpolitikan Islam, mekanisme politik juga menjadi sesuatu yang penting dimana harus ada saling kontrol antara penguasa dan rakyat. Sebab kontrol rakyat sebagai warga negara merupakan kewajiban dan

---

<sup>24)</sup> S. P. Varna, *Teori Politik Modern*, alih bahasa Yohanes Kristianto SI dkk, cetakan ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 217.

<sup>25)</sup> Maurice Deverger, "Asal Mula Partai Politik" dalam Ichlasul Amal (ed), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, cetakan ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 13.

merupakan bentuk partisipasinya dalam politik.<sup>26)</sup> Dalam hal ini kontrol harus didasarkan pada hukum Tuhan<sup>27)</sup>.

Menurut kalangan Sunni agama dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan dan harus didasarkan pada hukum Islam.<sup>28)</sup> Hampir sama dengan Husein Haikal akan tetapi menurut Haikal, Islam tidak memberikan petunjuk yang langsung dan rinci tentang bagaimana umat Islam mengatur urusan negara. Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya yang pada akhirnya akan mewarnai pola kehidupan politik. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: Iman (percaya) akan ke-Esa-an Tuhan (Tauhid), percaya tentang adanya hukum alam atau Sunah Allah yang pasti dan tidak berubah dan yang terakhir adalah persamaan<sup>29)</sup>. Tauhid merupakan prinsip utama dan pertama dari sekian

---

<sup>26)</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, cetakan ke-2, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 115.

<sup>27)</sup> Sistem politik Islam masih mendasarkan dan menempatkan syari'ah dan kedaulatan sebagai hukum tertinggi tanpa adanya interpretasi yang disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat sebagaimana konsep politik yang dikeluarkan oleh Abu A'la al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, cetakan ke-4, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 225-243. Berbeda dengan Qomaruddin Khan bahwa politik Islam didasarkan pada situasi kesejarahan dan tidak memiliki kesucian relegius dalam dirinya. Benar, Nabi mendirikan suatu regim politik tetapi pendirian regim tersebut bertalian dengan situasi kesejarahan bukan merupakan tujuan hakiki dari misi kenabiannya. Islam hanya bertujuan menciptakan suatu tata moral yang didasarkan pada ketaqwaan kepada Tuhan, pertanggungjawaban terhadap Tuhan dan manusia, persamaan dan persaudaraan umat manusia. Islam juga bertujuan menciptakan tata sosialnya sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai yang penting dan tenumus dengan baik maka negara apapun yang dibangun oleh kaum muslimin, dan negara tersebut –terlepas bentuk dan strukturnya- apabila berhasil menciptakan suatu masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai tersebut akan dipandang sebagai sebuah negara Islam. Qomaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, alih bahasa Taufik Adnan Kamal, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 89-90.

<sup>28)</sup> John. L. Esposito, *Islam dan Politik*, Alih bahasa: H. M Joesoef Sou'yb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 307.

<sup>29)</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara; Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya*, (Jakarta: UI Press, 1994), hlm. 186-187.

prinsip yang ada. Konsepsi Haikal ini jauh berbeda dengan pemikir politik Islam lainnya seperti Abu al-A'la al-Maududi, Rashid Ridha dan Sayyid Qutb yang diklasifikasikan oleh Munawir sebagai kelompok yang berkecenderungan tradisional dan semangat anti-Barat.<sup>30)</sup> Menurut mereka pemerintahan Islam harus mempunyai watak dan diantara salah satu watak itu adalah penguasa memerintah dan menjamin pelaksanaan Syari'at Islam, baik penguasa maupun yang dikuasai harus terikat oleh Syari'at<sup>31)</sup>.

Jika pemimpin atau pemerintah telah melanggar ketentuan hukum Tuhan maka rakyat harus memperingatkannya. Memperingatkan suatu pemerintahan –terlepas dari bentuk dan strukturnya- bisa dilakukan secara kolektif (lewat partai atau organisasi) dan juga bisa secara individual. Peringatan atau protes bisa dengan jalan “*accomodative*” dan bisa dengan jalan “*non-accomodative*”.<sup>32)</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>30)</sup> Munawir Sadjazali mengklasifikasikan para pemikir politik Islam kontemporer ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama dengan kecenderungan tradisionalnya dan semangat anti-Barat. Kelompok ini diwakili oleh Rasyid Ridha, Abu A'la al-Maududi dan Mohammad Abduh. Kelompok kedua mempunyai anggapan bahwa Islam tidak berbeda dari agama-agama yang lain, yang hanya mengurus hubungan antara manusia dengan Tuhan sementara urusan lainnya tidak, kelompok ini diwakili oleh Ali Abd al-Raziq dan yang terakhir adalah kelompok yang diwakili oleh Husein Haikal yang bercirikan sebagai kelompok moderat.

<sup>31)</sup> selanjutnya baca John. L. Esposito, *Islam dan Politik*, Alih bahasa: H. M Joesoef Sou'yb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 311-312.

<sup>32)</sup> F. Eickelman and James Piscatori, *Muslim Politics*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1996), hlm. 109.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library Research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama, sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (*documentary research*).

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif-analitis dan explanatoris, yaitu penelitian ini berusaha untuk memaparkan sejarah peranan partai Masyumi secara komprehensif. Kemudian data tersebut dianalisis secara mendetail sehingga dihasilkan kesimpulan yang memadai. Dari analisis tersebut akan dijelaskan apa sebenarnya peranan partai Masyumi terhadap pemerintahan Soekarno pada kurun waktu 1955-1960.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-historis. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sejarah peranan partai Masyumi terhadap pemerintahan Soekarno (1955-1960) sehingga muncul sebuah kesimpulan peranan Masyumi bagi pemerintahan Soekarno waktu itu.

## 4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian sejarah maka sumber primer yang digunakan adalah:

- a. Dokumentasi organisasi partai Masyumi berupa catatan kongres atau rapat, buku kenang-kenangan organisasi partai Masyumi, laporan tahunan atau majalah dari partai itu sendiri dan autobiografi tokoh yang terlibat dalam partai Masyumi.



b. Dokumen resmi pemerintah.<sup>33)</sup>

Adapun sumber sekunder adalah semua buku atau karangan, brosur, pamflet dan sebagainya yang ditulis oleh orang lain tentang Masyumi.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif. Induksi merupakan langkah menganalisis data dengan bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini akan dianalisis peranan khusus Partai Masyumi terhadap pemerintahan Soekarno kemudian ditarik suatu kesimpulan umum yang *legitimate* dalam sebuah bangunan politik suatu pemerintahan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi dimulai bab I yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian bab II berisi tinjauan tentang pemerintahan dan partai politik yang mempunyai dua sub-bab yaitu pengertian pemerintahan dan partai politik dan yang terdiri dari definisi partai politik dan urgensitas partai politik dalam pemerintahan.

Bab III dibahas tentang partai Masyumi dan pemerintahan Soekarno (1955-1960) terdiri dari tiga sub-bab yaitu; pemerintahan Soekarno (1955-

---

<sup>33)</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, diterjemahkan oleh Nugroho Notokusanto, cetakan ke-5, (Jakarta: UI Pres, 1975), hlm. 38. dan juga Hasan Usman, *Seri Penterjemahan: Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Depag, 1986), hlm. 64-65

1960), sikap partai Masyumi terhadap pemerintah Soekarno (1955-1960) yang terdiri dari Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957) dan Kabinet Djuanda Kartawijaya (Maret 1957-Juli 1959), dan sikap partai Masyumi terhadap perundang-undangan masa Soekarno (1955-1960).

Setelah mengetahui dan mendeskripsikan landasan teori dan partai Masyumi beserta pemerintahan Soekarno (1955-1960) maka dalam bab IV dibahas tentang analisa sikap Partai Masyumi pada masa pemerintahan Soekarno (1955-1960) yang terdiri dari dua sub-bab yaitu sikap partai Masyumi terhadap pemerintah Soekarno (1955-1960) dan sikap partai Masyumi terhadap perundang-undangan masa Soekarno (1955-1960). Setelah dilakukan analisa secara menyeluruh dalam bab IV maka ditariklah kesimpulan dalam bab V. Dalam bab terakhir ini akan disertakan saran-saran atau lampiran yang mendukung.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Partai Masyumi pada masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960) ada dalam dua hal yaitu:

1. Peranan dalam hal Pemerintah selama 1955-1960.
2. Peranan dalam hal Perundang-Undangan selama 1955-1960.

Untuk peranan Partai Masyumi dalam hal pemerintah kurun waktu 1955-1960 dapat disimpulkan ada dua macam peranan yang dimainkan oleh Partai Masyumi yaitu:

1. Sebagai Partai pendukung Pemerintah dengan naiknya Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri (Agustus 1955-Maret 1956).
2. Sebagai Partai oposisi Pemerintah dengan menggunakan dua metode yaitu:
  - a. *Oposisi Parleментарian* yaitu oposisi yang ada dalam parlemen dan menggunakan cara-cara yang *non-violence* dan didasarkan pada konstitusi. Ini terjadi ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dan tahun pertama Kabinet Djuanda (1957-1959).
  - b. *Oposisi Ekstra Parleментарian* yaitu oposisi yang menggunakan cara-cara ekstra parlementer seperti mendukung gerakan separatis/pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian

pengikut/pimpinan Partai Masyumi. Ini terjadi ketika tahun kedua Kabinet Djuanda (1957-1959) sampai berakhirnya Kabinet.

Sementara peranan Partai Masyumi dalam hal perundangan-undangan dapat disimpulkan bahwa partai Masyumi selalu menolak setiap perundang-undangan. Ini dapat dilihat dari berbagai sikap partai Masyumi terhadap semua peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang tidak berwenang, dalam hal ini oleh Presiden Soekarno dan selalu mempertanyakan keabsahan peraturan tersebut secara yuridis ketatanegaraan.

## **B. Saran-Saran**

1. Ideologi merupakan hal utama dan harus dimiliki oleh setiap insan politik. Jangan sekali-kali hidup tanpa ideologi (keyakinan) karena keyakinanlah yang menjadi lentera hidup manusia.
2. Berpolitik secara humanis merupakan hal yang patut diperhatikan dan dilaksanakan. Hindarilah berpolitik hanya untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi. Politik adalah untuk menghormati manusia atas manusia bukan mengkhianatinya.
3. Persatuan dan kesatuan untuk menghadapi penindasan dan pengkhianatan harus tetap dilakukan secara bersama dan tidak melihat kepentingan orang-perorang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Ar-Rais, Dhiya' ad-Din, *Islam dan Khilafah; Kritik terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam 'Ali 'Abdur Raziq*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1985.
- Haikal, Muhammad Husein, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1996.
- Khan, Qomaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, alih bahasa Taufik Adnan Kamal, Bandung: Pustaka, 1987.
- , *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1995.
- Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. ke-6, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. ke-6, Bandung: Mizan, 1995.
- Usman, Muklis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

### Kelompok Buku Umum

- Abdillah, Maskuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Amal, Ichlasul (ed), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, cet. ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Amin, S. M, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Anderson Benedict, *Komunitas-Komunitas Imajiner; Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*, alih bahasa Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 1999.

- Bakry, Noor Ms, *Orientasi Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Liberty, 1994.
- Benn, S. I dan Paters, R. S, *The Principle of Political Thought*, New York: Colliers Book, 1959
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-3, Jakarta: Gramedia, 1972.
- Budiman, Arif, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, cet.ke-2, Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Busyairi, Badruzzaman, *Catatan Perjuangan; H. M. Yunan Nasution*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, alih bahasa Tim Yayasan Obor, Jilid I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Djaja, Tamar, *Sukarno-Hatta; Persamaan dan Perbedaan*, Jakarta: Sastra Hudaya, tt.
- Eickelman, F. and Piscatori, James, *Muslim Politics*, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
- Esposito, John. L, *Islam dan Politik*, alih bahasa Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Feith, Herbert dan Lance Castles, (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Giddens, Anthony, *The Third Way; The Renewal of Social Democracy*, alih bahasa Ketut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, alih bahasa Nugroho Notosusanto, cet. ke-5, Jakarta: UI Press, 1975.
- Haris, Samsuddin, *Demokrasi di Indonesia; Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- I.N, Soebagijo, *K. H. Masjkur; Sebuah Biografi*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1982.
- , *Jusuf Wibisono; Karang di Tengah Gelombang*, Jakarta: Gunung Agung, 1980.
- Kartodirdjo, Sartono dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1972.

- Kuntowijoyo, *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, Yogyakarta: Bentang, 1994.
- , *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Legge, John D, *Sukarno; Sebuah Biografi Politik*, alih bahasa Pustaka Sinar Harapan, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Levine, Peter, *Nietzche and The Modern Crisis of The Humanities*, New York: State University of New York Press, 1995.
- Lijpart, Arent, *Pemerintahan Parleментар dan Præsidental*, Ibrahim dkk (penyadur), cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Macridis, Roy dan Brown, Bernard E., *Perbandingan Politik; Catatan dan Bacaan*, alih bahasa AR Henry Sitanggang, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.
- MD, Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Martowidjojo, Mangil, *Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- MS, Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 1996.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Nielsen, Kai, *Equality and Liberty; A Defence of Radical Egalitarianism*, New Jersey: Rowman & Allandheid Publishers, 1985.
- Noer, Deliar, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- , *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, cet. ke-1, Jakarta: Grafiti Pers, 1987.
- Riklefs, MC, *Sejarah Indonesia Modern*, alih bahsa Gadjah Mada University Press, cet. IV, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Newfeldt, Victoria, *Webster New World College Dictionary of American English*, New York: Macmillan Company, 1988.

Partanto, Pius A dan Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.

### **Kelompok Koran, Majalah, dan Makalah**

*Abadi* 2 Maret 1956.

Madjid, Nurcholis, "Azas-Azas Pluralisme dalam Masyarakat Madani", makalah dalam seminar Nasional "Masyarakat Madani dalam Perspektif Agama dan Politik" IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap politik Partai Masyumi pada masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960) terdapat dalam dua hal yaitu:

1. Sikap politik dalam hal Pemerintah selama 1955-1960.
2. Sikap politik dalam hal Perundang-Undangan selama 1955-1960.

Untuk sikap politik Partai Masyumi dalam hal pemerintah kurun waktu 1955-1960 dapat disimpulkan ada dua macam sikap politik yang dimainkan oleh Partai Masyumi yaitu:

1. Sebagai Partai pendukung Pemerintah dengan naiknya Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri (Agustus 1955-Maret 1956).
2. Sebagai Partai oposisi Pemerintah dengan menggunakan dua metode yaitu:
  - a. *Oposisi Parlementarian* yaitu oposisi yang ada dalam parlemen dan menggunakan cara-cara yang *non-violence* dan didasarkan pada konstitusi. Ini terjadi ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dan tahun pertama Kabinet Djuanda (1957-1959).
  - b. *Oposisi Ekstra Parlementarian* yaitu oposisi yang menggunakan cara-cara ekstra parlementer seperti mendukung gerakan separatis/pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian

## Biografi Ulama dan Sarjana

### 1. Deliar Noer

Lahir di Medan 9 Februari 1926. Meraih gelar B.A dari Unas. Menyelesaikan studi politiknya di Universitas Cornell, AS. Disertasinya diterbitkan oleh Oxford University Press dengan judul *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*.

Sebelum ke Australia, bekas staf pribadi Ketua Presidium Kabinet Ampera ini pernah menjadi Rektor IKIP Jakarta (1967-1974). Di Australia ia melakukan penelitian di AN dan mengajar di Universitas Griffith. Karya-karyanya yang lain adalah *Partisipasi dalam Pembangunan (1978)*, *Administration of Islam in Indonesia (1978)*, *Ideologi, Politik dan Pembangunan (1983)*, dan *Islam, Pancasila dan Azas Tunggal (1984)*.

### 2. Kuntowijoyo

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 September 1943. Setelah lulus dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM (1969), mengajar pada Fakultas tersebut. Pada tahun 1973 mendapat tugas belajar di Universitas Connecticut hingga memperoleh gelar M.A, sedangkan gelar Ph. D dalam ilmu sejarah diperoleh dari Universitas Columbia, AS (1980) dengan disertasi berjudul "*Social Change in an Agrarian Society: Madura 1850-1940*".

Karya-karya Kuntowijoyo berupa cerita pendek, novel, drama dan esai kebudayaan. Cerpennya "*Dilarang Mencintai Bunga-bunga*" memperoleh hadiah pertama dari majalah *Sastra* (1968). Pada tahun yang sama dramanya "*Rumput-rumput Danau Bento*" memperoleh hadiah harapan dari BPTN. Naskah dramanya yang lain, *Topeng Kayu*, pernah mendapatkan hadiah dari Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1973. Novel-novelnya yang pernah dipublikasikan; *Kereta Api Berangkat Pagi Hari (1966)*, *Pasar (1972)* dan *Khotbah di Atas Bukit (1976)*. *Khotbah di Atas Bukit* dan *Pasar* di cetak ulang oleh Bentang Intervisi Utama.

Selain sebagai penulis cerpen, novel dan naskah drama, Kuntowijoyo dikenal juga sebagai penyair. Kumpulan puisinya yang telah terbit adalah *Isyarat dan sajak Awang-Uwung*.

Sebagai cendekiawan dan budayawan, Kuntowijoyo banyak menghasilkan tulisan kritis dalam menganalisis persoalan yang tengah berkembang. Kumpulan tulisannya yang telah terbit; *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Shalahuddin Press, 1985), *Budaya dan Masyarakat* (Tiara Wacana, 1987), *Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi* (Mizan, 1991), *Radikalisasi Petani* (Bentang Intervisi Utama, 1993).

### 3. Munawir Sjadzali

Lahir di Klaten, Jawa Tengah 7 November 1925. Pendidikan SD dan SMP di Solo (1937-1940); Sekolah Tinggi Islam Manbaul Ulum dan SMA di Solo (1943);

Kursus Diplomatik dan Konsuler Deplu di Universitas Exeter, Inggris Raya (1953-1954); memperoleh gelar M. A dari Universitas Georgetown, AS (1959); mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994). Menulis buku; *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press, (1992), *Ijtihad dalam Sorotan*, Munawir Sjadzali (et. Al), Bandung, MIZAN, (1990). Pernah menjadi guru SD Islam Ungaran Semarang (1944-1945); Penghubung Markas Pertempuran di Jawa Tengah/Pembantu Sukarela Wali Kota Solo (1945-1949); Staf Seksi Arab/Timur Tengah Deplu (1950); tugas belajar di Inggris (1953-1954); Dperbantukan pada Sekber Konferensi Asia Afrika di Jakarta (1954-1955); Atase/Sekretaris III KBRI di Washington D. C., (1956-1959); Kepala Bagian Amerika Utara Deplu (1959-1963); Sekretaris I KBRI di Colombo Sri Lanka (1965-1968); Kabiro Sekretaris Jendral Deplu (1969-1970); Minister Consellor/Watari di KBRI London (1971-1974); Kabiro Umum Deplu Jakarta (1975-1976); Duta Besar RI untuk Emirat Arab/Bahrain/Qatar/Perserikatan Keemiran Arab (1976-1990); Staf Ahli Menlu RI (1980-1983); Menteri Agama RI selama dua periode (1983-1993); dan pernah menjadi anggota DPA RI dan Komnas HAM. Disamping itu Munawir adalah anggota dari Associate Member International Institute for Strategic Studies di London. Menjadi Lektor Tamu pada Institute of Islamic Studies McGill University, Canada (Maret-Mei 1994); menjadi Lektor Tamu pada Universitas Leiden, Belanda (April 1995); anggota tim Penasehat Yayasan Wakaf Paramadina. Memeroleh Bintang Maha Putera Adipradana; Satyalancana Karya Satya. Klas II; Great Cordon of Merit (Qatar); Medallion of the Order of Kuwait, Special Class; Heung in Medal, Second Class (Republik Korea); Order of the Yugoslav Flag with Golden Wreath (Yugoslavia); Tokoh Maal Hijrah 1415 (Malaysia).

#### **4. Meriam Budiardjo**

Memulai karirnya dalam masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1944-1945 menjadi pegawai Komisi Bahasa Indonesia yang berada dibawah naungan Kementerian P dan K yang dipimpin oleh Sutan Takdir Alisjahbana SH.

Pada tahun 1946-1947 meneruskan kariernya di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Menjadi Sekretaris pada Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, India selama dua tahun (1948-1950). Sesudah penyerahan kedaulatan, ditempatkan di Washington DC (1950-1953) sebagai Sekretaris II. Memeroleh gelar M. A dari Georgetown University dalam bidang Ilmu Politik (1955).

Menjadi Ketua Lembaga Penelitian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1956-1959). Antara 1956-1961 Miriam Budiardjo belajar ke Amerika mengikuti kuliah di Harvard University. Pada tahun 1962, turut mendirikan dan mengajar di bagian Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan di bawah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menjadi Ketua Jurusan Ilmu Politik UI (1962-1973), Menjadi Pembantu Dekan bidang Akademis merangkap Sekretaris Fakultas (1968-1971), dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap dalam Ilmu Politik (1973), menjadi Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (1974-1979), di tunjuk sebagai Koordinator Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia (1981-1989) dan diangkat menjadi Ketua Konsorsium Ilmu-Ilmu Sosial (1985-1989).

Pada tahun 1989 yang memasuki masa purna baktinya, Meriam masih aktif mengajar sebagai Guru Besar Luar Biasa di Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Hukum Militer. Pada tahun 1993 ditunjuk oleh pemerintah RI menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merangkap sebagai Wakil Ketua I.

## **CURICULLUM VITAE**

**N a m a** : M. Ridwan  
**N I M** : 9637 2492  
**Tempat Tanggal Lahir** : Bojonegoro, 15 April 1978  
**Alamat Asal** : Jl. Monginsidi No. 160 Bojonegoro Jawa Timur  
**Alamat di Yogyakarta** : Jl. Timoho Gg. Gading 14 Sapean Yogyakarta

### **Riwayat Pendidikan**

1. MI Al-Hidayah Pacul Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. (lulus 1990)
2. MTsN 1 Bojonegoro Kab. Bojonegoro (lulus 1993)
3. MAN Program Khusus Denanyar Jombang (lulus 1996)
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996-.....)

### **Identitas Orang Tua:**

**Nama Bapak** : M. Sahidan  
**Pekerjaan** : Penjaga Malam  
**Nama Ibu** : Mutmainnah  
**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga  
**Alamat** : Jl. Monginsidi No. 160 Bojonegoro Jawa Timur.